

Manajemen & Ekspresi

SKRIPSI

*
ANOM SURYA PUTRA

STRATEGI KUASA MENGHUKUM DAN WACANA TANDING

STUDI HERMENEUTIK TERHADAP KASUS KHONGHUCU
DI PTUN SURABAYA



*KIR
Pr. 2410/98
Put
A*

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1998

STRATEGI KUASA MENGHUKUM DAN WACANA TANDING

**STUDI HERMENEUTIK TERHADAP KASUS KHONGHUCU
DI PTUN SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Umar Hasjim, SH

NIP. 130531802

Mahasiswa,



Anom Surya Putra

NIM. 039313722

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan lulus pada ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
pada tanggal 9 Juli 1998

Tim Penguji

Ketua : Dr. Frans Limahelu, SH, LL.M.

Sekretaris : Drs. Abdul Shomad, SH.

Anggota : 1. Umar Hasjim, SH.

2. Sri Hajati, SH, MS.

sirkan dalam kerangka sosiologis untuk mengetahui tentang pengakuan terhadap suatu ajaran agama.

Namun, penafsiran sosiologis atas beberapa aturan hukum tetap berada pada batas-batas normatifitas Ilmu Hukum. Artinya, tidak memandang (proposisi) keberlakuan empiris suatu aturan hukum sebagai faktor utama (kebenaran) seperti yang dibahas dalam beberapa perspektif sosiologi hukum positivis. Melainkan sebagai entitas yang berdiri sendiri (otonom) dan melengkapi keberlakuan normatif-evaluatif. Di sini, seorang sosiolog dalam memandang Klaus Khonghucu, tidak hanya memahami sistem hukum yang mengatur keberadaan mereka namun juga diperbolehkan untuk menilai (secara evaluatif) apakah sistem hukum tersebut telah mewujudkan hak-hak mereka atau tidak.⁵²

4.1. Kesimpulan:

4.1.1. Kuasa dalam Spiral Hermeneutik Hakim

Dalam perspektif hermeneutikal Bab II, diperlihatkan bahwa Hakim PTUN dan PTTUN berpikir dalam suatu spiral hermeneutik. Ia menalar dari fakta-fakta dalam kasus penolakan Kantor Catatan Sipil atas perkawinan Eudy-Lany menurut landasan dalam aturan hukum. Langkah Hakim ini berarti sedang berupaya untuk mengkuualifikasi fakta-fakta

52. Bandingkan dengan perspektif Weberian yang menekankan fungsi sosiolog sebagai orang yang memahami sistem hukum, dan bukan untuk menilainya. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan kelima, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 63

yang diajukan dalam kaidah hukum tertentu. Selanjutnya, Hakim melakukan interpretasi aturan hukum tertentu ke fakta-fakta yang diajukan di meja pengadilan.

Di bawah ini konstruksi dari spiral hermeneutik Hakim, yang dipetik dari bab II:

a. proses pencatatan Kantor Catatan Sipil merupakan kaidah perintah, di mana instansi di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ini diperintahkan untuk mencatat perkawinan dari pemeluk 5 (lima) agama di Indonesia. Dalam hal ini pemeluk agama Khonghucu tidak termasuk di dalamnya.

Kaidah perintah ini terdapat dalam Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/1978 jo Surat Mendagri No. 477/2535/PUOD/1990.

b. keberadaan agama Khonghucu di Indonesia secara mandiri adalah dilarang Departemen Agama. Ini sesuai dengan kaidah larangan yang termuat dalam Surat Kakanwil Depag Jatim No. Wm.01.2/4683/95, yang melarang ajaran Khonghucu secara mandiri kecuali mereka yang telah meleburkan diri dalam agama Buddha.

Kaidah perintah dalam 2 (dua) Surat terbitan Mendagri tersebut mengimplikasikan sebuah izin bagi Kantor Catatan Sipil untuk menolak pencatatan umat Khonghucu (Budy-Lany) karena termasuk dalam kategori selain 5 (agama) di Indonesia.

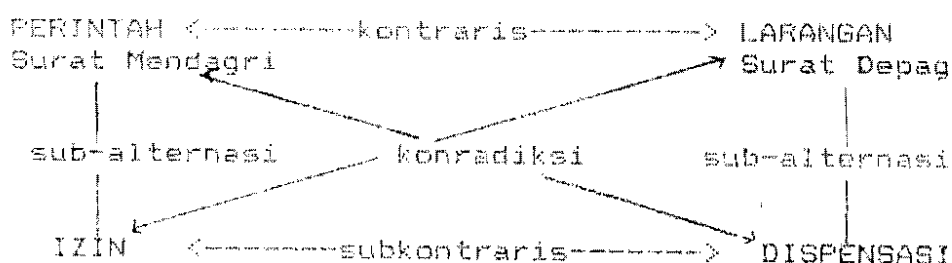
Dalam logika sub-alternasi, kaidah larangan dalam Surat Kakanwil Depag Jatim tersebut, mengimplikasikan

sebuah dispensasi di mana umat Khonghucu dapat menikah setelah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Negeri (PN) sebagai "warganegara yang menikah tanpa agama". Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/72/IV/1981.

Proses kemenangan kaidah larangan dan perintah tersebut, dipengaruhi asas hukum (kaidah penilaian) berupa asas legalitas pemerintahan dan kaidah kewenangan (meta-kaidah) yang bersifat mengikat. Aturan hukum yang menjadi dasar hukum pihak Kantor Catatan Sipil berdasarkan asas legalitas, dinyatakan benar oleh Hakim. Dan kewenangan yang mengikat Kantor Catatan Sipil, di mana ia tidak boleh menentukan kebijaksanaannya sendiri, menambah kokohnya kaidah larangan dan kaidah perintah di atas.

Dengan demikian, dalam perspektif asas legalitas "hukum perkawinan" agama Khonghucu Indonesia yang pernah ditetapkan tanggal 21 Desember 1975, oleh Suryo Hutomo (Ketua Umum MATAKIN) di Tangerang menjadi tidak mempunyai daya-ikat lagi dalam tatanan hukum nasional. Meskipun ketentuan ini diterbitkan bagi umat Khonghucu berdasarkan UU No. 1 PMDG/1975 dan pasal 2 UU Perkawinan yang menghormati hukum perkawinan tiap agama.

Tabel 5



Tentang Undang-undang No. 1/PNPS/1965 yang menurut penggugat mengakui keberadaan agama Khonghucu, dinilai Hakim tidak mengatur Khonghucu tapi Khong Tju. Alasan Hakim ini dalam Bab III telah dinyatakan bertentangan dengan Surat Menkokesra No. 764/Y/1983. Karena Surat Menkokesra 1983 ini menyatakan tidak ada perbedaan antara bahasa hukum "Khong Tju" dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Khonghucu. Tetapi, implikasi serius dari Surat Menkokesra adalah dinyatakannya Khonghucu bukan sebagai agama setelah menimbang beberapa aturan hukum dan himbauan/pidato Presiden Soeharto 1979. Surat ini sekaligus jawaban dari protes umat Khonghucu saat itu terhadap penelitian Departemen Agama 1980 yang menindaklanjuti pidato Soeharto bulan Januari dan Februari 1979. Penelitian Depag tersebut menyatakan bahwa Khonghucu bukanlah agama tapi filsafat hidup.

Mengikuti alur nalar di atas, maka terlihat jelas bahwa spiral hermeneutik Hakim dipengaruhi mutlak pidato (ujaran) Presiden Soeharto.

4.2.2. Strategi Kuasa Menghukum Soeharto

Dalam Bab III diutarakan tentang wacana agama resmi dan anti Cina sebagai wacana dominan dan melandasi praktik diskursif Soeharto tersebut.

Hal ini dapat kita telusuri mulai tahun 1965-1967 ketika Indonesia dilanda pergolakan anti Komunisme dan

bangunanisme adalah di awal tahun 1979, di mana dengan tegarnya Soeharto mengucapkan pidato di depan sidang kabinet bulan Januari 1979.

4.1.3. Wacana Tanding Umat Khonghucu

- a. Perlawanan Khonghucu yang dimulai sejak 1980-an berwujud permintaan pengakuan sebagai agama resmi berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965. Hal ini amat lemah karena negara dan masyarakat Indonesia sudah sekian lama dikuasai wacana rasisme. Sehingga, semua gugatan secara hukum Budy-Lany akan berbenturan dengan wacana rasisme yang menelusup di dalam spiral hermeneutik Hakim.
- b. Wacana rasisme itu merupakan alam pikir serba kekuasaan mempengaruhi seluruh aturan hukum semenjak 1980-sekarang. Wacana ini berujud anti-Cina dan menyebar di seluruh batang tubuh masyarakat, dan menjadi dominan karena pelestarian anti Komunisme, yang teridentikkan dengan anti Tionghoa dan seluruh tradisinya seperti agama Khonghucu. Umat Khonghucu belum secara terbuka melawan wacana rasis ini dengan wacana keagamaannya.
- c. Pidato Presiden Soeharto tahun 1979 mengilhami seluruh pembuat aturan hukum dan masyarakat Indonesia, untuk melakukan strategi menghukum terhadap Khonghucu sebagai komunitas "Cina" dan "Komunis" yang kemudian sengaja ditempatkan di luar 5 (lima) agama resmi. Dalam situasi pasca turunnya Soeharto, wacana ini belum terhapus dan justru makin eksis keberadannya.